

RENCANA KERJA

TAHUN 2019



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

JL. M.H THAMRIN NO.11 TELP/FAX (0536) 3224547, PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH 73112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 ini mengacu pada rencana pelaksanaan program kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016–2021 DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada di lingkungan internal dan eksternal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut guna mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas semoga kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 02 Juli 2018

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 0011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra PD	4
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD	23
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	69
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	79
3.3 Program dan Kegiatan	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	83
BAB V PENUTUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terdiri dari 6(enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun RENJA PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. RENJA PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan PD DP3A-PPKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

RENJA PD DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. RENJA PD DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

RENJA PD DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen RENJA PD DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 berfungsi menterjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA PD mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 taun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RENJA PD DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA PD DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DP3A-PPKB tahun 2019;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENJA PD DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen RENJA PD Tahun 2019 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2019. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dijabarkan pada **tabel 2.1**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018

Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)		7.800,00	1.100,00	1.000,00	992,31	99,23	1.500,00	3.592,31	46,06
2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		7.200,00	1.000,00	900,00	892,31	99,15	1.200,00	3.092,31	42,95
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	600,00	100,00	100,00	92,31	92,31	100,00	292,31	48,72
2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	2,00	26,00	36,11
2.02.2.02.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah unit	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	2,00	26,00	36,11
2.02.2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	2,00	26,00	36,11
2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.02.2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	2,00	26,00	36,11
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	2,00	26,00	36,11
2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.02.2.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	40,00
2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	300,00
2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.02.2.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.02.2.02.01.01.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah Aparatur	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2.02.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan tempat parkir	Jumlah unit	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	16,67
2.02.2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	26,00
2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas pegawai (%)	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	33,33
2.02.2.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	25,00
2.02.2.02.01.05.36	Rapat koordinasi perencanaan	Jumlah rapat	54,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,11
2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.02.2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00
2.02.2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00
2.02.2.02.01.06.06	Penyusunan rka-SKPD	Jumlah dokumen	12,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	50,00
2.02.2.02.01.06.15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen	12,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	50,00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Capaian pengelolaan aset dan barang milik daerah (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.02.2.02.01.08.01	Pengelolaan inventaris barang daerah	Jumlah dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00
2.02.2.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.02.2.02.01.15.05	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00
2.02.2.02.01.15.09	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Jumlah Dokumen	6,00	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00	4,00	66,67
2.02.2.02.01.15.11	Rakor Pokja PUG Kab./Kota seKalteng	Jumlah Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
2.02.2.02.01.15.14	Sosialisasi Pembentukan Pokjatap danSatgas PkdRT se-Kalteng	Jumlah peserta	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00
2.02.2.02.01.15.15	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Jumlah Dokumen	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	200,00
2.02.2.02.01.15.20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA TingkatProvinsi	Jumlah Dokumen	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	40,00
2.02.2.02.01.15.21	Sosialisasi/Advokasi pengembangan PHA diKab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00	2,00	100,00
2.02.2.02.01.15.24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Jumlah	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dokumen								
2.02.2.02.01.15.25	Rakornas Forum Anak Nasional	Jumlah Dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00
2.02.2.02.01.15.29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00
2.02.2.02.01.15.30	Rapat Koordinasi Pokjatang Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah Dokumen	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
2.02.2.02.01.15.31	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Jumlah Dokumen	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
2.02.2.02.01.15.36	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen	6,00	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00	2,00	33,33
2.02.2.02.01.15.39	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	Jumlah Dokumen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
2.02.2.02.01.15.40	Monev PUG di Daerah	Jumlah Kabupaten/kota	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,79
2.02.2.02.01.15.41	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didiera	Jumlah Kabupaten/kota	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,79

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.02.2.02.01.16.33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah Dokumen	6,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	33,33
2.02.2.02.01.16.34	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Jumlah OPD	24,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	50,00
2.02.2.02.01.16.35	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	Jumlah Dokumen	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
2.02.2.02.01.16.36	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Jumlah peserta	66,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,15
2.02.2.02.01.16.42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Jumlah Dokumen	1,00	0,00	3,00	3,00	100,00	1,00	4,00	400,00
		Jumlah Peserta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	25,00
2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.02.2.02.01.17.26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Jumlah Kegiatan	30,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	50,00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.17.30	Penyusunan Buku Panduan Pencegahan KdRT	Jumlah exemplar	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
2.02.2.02.01.17.42	Sosialisasi Anti Kekerasan	Jumlah kegiatan	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00	2,00	33,33
2.02.2.02.01.17.33	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.02.2.02.01.17.35	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	Jumlah peserta	175,00	35,00	0,00	0,00	0,00	30,00	65,00	37,14
2.02.2.02.01.17.36	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	Jumlah kegiatan	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	4,00	6,00	100,00
2.02.2.02.01.17.38	Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Jumlah Dokumen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2.02.01.17.39	Deteksi Dini Kanker Cervix Bagi Perempuan	Jumlah peserta	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
2.02.2.02.01.17.40	Layanan Kesehatan Khusus Perempuan	Jumlah peserta	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2.02.01.17.41	Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	Jumlah kegiatan	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	25,00
2.02.2.02.01.17.42	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah kegiatan	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	4,00	6,00	100,00
2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.18.07	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Jumlah kegiatan	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	33,33
2.02.2.02.01.18.15	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah dokumen monev	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
2.02.2.02.01.18.16	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah peserta	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00
2.02.2.02.01.18.18	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	Jumlah Dokumen	3,00	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00	3,00	100,00
2.02.2.02.01.18.19	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	Jumlah Desa PM2L	60,00	10,00	4,00	4,00	100,00	0,00	14,00	23,33
2.02.2.02.01.18.25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Jumlah kegiatan	8,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	25,00
2.02.2.02.01.18.26	Capacity Building Bagi perempuan	Jumlah peserta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	25,00
2.02.2.02.01.18.27	Peningkatan kelompok usaha perempuan	Jumlah peserta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	12,50
2.02.2.02.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan kesejahteraan dan perlindungan khusus anak (%)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	16,67

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.18.17	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	Jumlah peserta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	25,00
2.02.2.02.01.18.20	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah Pokja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.02.2.02.01.21	Program Penyusunan Profil Lembaga	Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.02.2.02.01.21.09	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah aplikasi	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50,00
2.02.2.02.01.21.10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	5,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00
2.02.2.02.01.21.12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah bulan	72,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	50,00
2.08	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	500,00	83,33
2.08.2.02.01 - 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan layanan kependudukan dan Pembinaan Keluarga (%)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	50,00
2.08.2.02.01.15.02	Pelayanan KIE	Jumlah Dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	50,00
2.08.2.02.01.15.22	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	20,00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2018	
					Target Kinerja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.2.02.01.15.29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	40,00
2.08.2.02.01.15.34	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Peserta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	25,00
2.08.2.02.01.15.35	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Dokumen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
2.08.2.02.01.15.36	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah peserta	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	25,00
2.08.2.02.01 - 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25,00
2.08.2.02.01.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Jumlah Peserta	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	25,00
2.08.2.02.01 - 25	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Cakupan penguatan Kelembagaan Kbd ma syarakat(%)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25,00
2.08.2.02.01.25.06	Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah Peserta	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **tabel 2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)		12,30	10,41	10,88	11,36	11,83	6,50	-	11,36	11,83	
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)		29,62	21,58	23,59	25,60	27,61	88,76	-	25,60	27,61	
11.3	Rasio KDRT		0,012	0,0244	0,0213	0,0182	0,0151	0,0088	-	0,0182	0,0151	
11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)		0,00	0,30	0,23	0,15	0,08	7,56	-	0,15	0,08	
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		57,18	53,06	54,09	55,12	56,15	53,61	-	55,12	56,15	

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)		100	100	100	100	100	100	-	100	100	
11.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		80,22	78,25	78,57	79,31	79,67	77,87	-	79,31	79,67	
11.8	Indek Pembangunan Gender (IPG)		90,00	89,36	89,54	89,67	89,88	89,25	-	89,67	89,88	
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,50	1,10	1,20	1,30	1,40	0,58	-	1,30	1,40	
12.2	Rasio akseptor KB		83,29	79,70	80,60	81,49	82,39	79,21	-	81,49	82,39	
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)		425.000	382.023	394.756	403.585	412.413	373.140	-	403.585	412.413	

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		148.072	170.497	164.891	159.285	153.678	243.211	-	159.285	153.678	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;

13. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. penyerasian kebijakan kependudukan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2(dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan terhadap perempuan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2015 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat

2. Tenaga kerja perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang

3. Politik dan Pengambilan keputusan

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya

4. Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L).

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

5. Kelembagaan Pengarusutamaan gender

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota

6. Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak

a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan

- menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya
- b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum
 - c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDs, perkawinan usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik
 - d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum (APH) memperlakukan anak seperti orang dewasa
 - e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
 - f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.

- g. Masih tingginya angka drop-out sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah, belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal. Selain itu, juga belum tersedia panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak.
 - h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
 - i. Belum semua kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
 - j. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju KLA
7. Permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program
 - b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak
 - c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat
 - e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

- f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan Keluarga Berencana

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Keluarga Berencana adalah belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah mengamanatkan bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini diharapkan semakin mendorong dan memperkuat BKKBD di Kabupaten/kota sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terlepas dari hal tersebut diatas, permasalahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Metode fasilitasi dan mekanisme operasional dilapangan dalam pelaksanaan Program KB belum optimal
2. Sarana dan prasarana pelayanan operasional, pembinaan dan penggerakan masih kurang
3. Kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung program masih kurang
4. Tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP
5. Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun)
6. Belum semua Kabupaten/Kota menerima DAK Bidang KB

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	29,44 %
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	72,43%
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	44,44%
4	Meningkatnya perlindungan anak	28,57%
5	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100%
6	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	100%
7	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk	66,67%
8	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	97,84%
9	Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	100%
Rata-rata persentase Capaian Sasaran		71,04%

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kabupaten /Kota	2	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG	Lembaga di Provinsi	41	34	82,93%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Lembaga di Provinsi	41	34	82,93%
		Kabupaten /Kota	11	9	81,81%
	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	Kelompok Usaha	4	5	125%
	Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup	Kab/Kota	3	0	0%
	Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	data terpilah anak				
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	5	1	20%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	5	1	20%
		Kabupaten /Kota	5	0	0%
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	Kebijakan di Provinsi	5	7	140%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	5	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan	Organisasi	15	15	100%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	Lembaga di Provinsi	5	5	100%
		Kabupaten /Kota	14	14	100%
		Organisasi	1	0	0%
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana	Persen	100	100	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas				
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	2	200%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Kabupaten /Kota	2	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Kabupaten /Kota	2	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat	Desa	2	0	0%
	Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Kebijakan di Provinsi	1	0
Kebijakan di Kabupaten / Kota			1	0	0%
Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi		Lembaga di Provinsi	8	0	0%
		Organisasi	15	0	0%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	khusus				
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti	Persen	100	100	100%
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100%
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100%
Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	Terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif	Persen	100	100	100%
	Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja	Persen	100	100	100%
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan Program	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk	Orang	3	0	0%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Pengendalian Penduduk	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk	Kesepakatan`	1	1	100%
	Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan	Dokumen	1	1	100%
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan	Dokumen	1	1	100%
	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	persen	80	79,21	99,01%
	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	orang	394.872	373.140	94,50%
Meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga	Kesepakatan`	1	1	100%

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Susunan Organisasinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Kepala Dinas , membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Bidang.

a. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

- Sub Bagian Penyusunan Program;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

b. Bidang Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Pemantapan Kelembagaan PUG;
- Seksi Pemantauan dan Evaluasi PUG;
- Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

c. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat , membawahi 3 (tiga) Seksi:

- Seksi Data;
- Seksi Penyebarluasan Informasi;
- Seksi Partisipasi Masyarakat.

d. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- Seksi Perlindungan Anak;
- Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak.

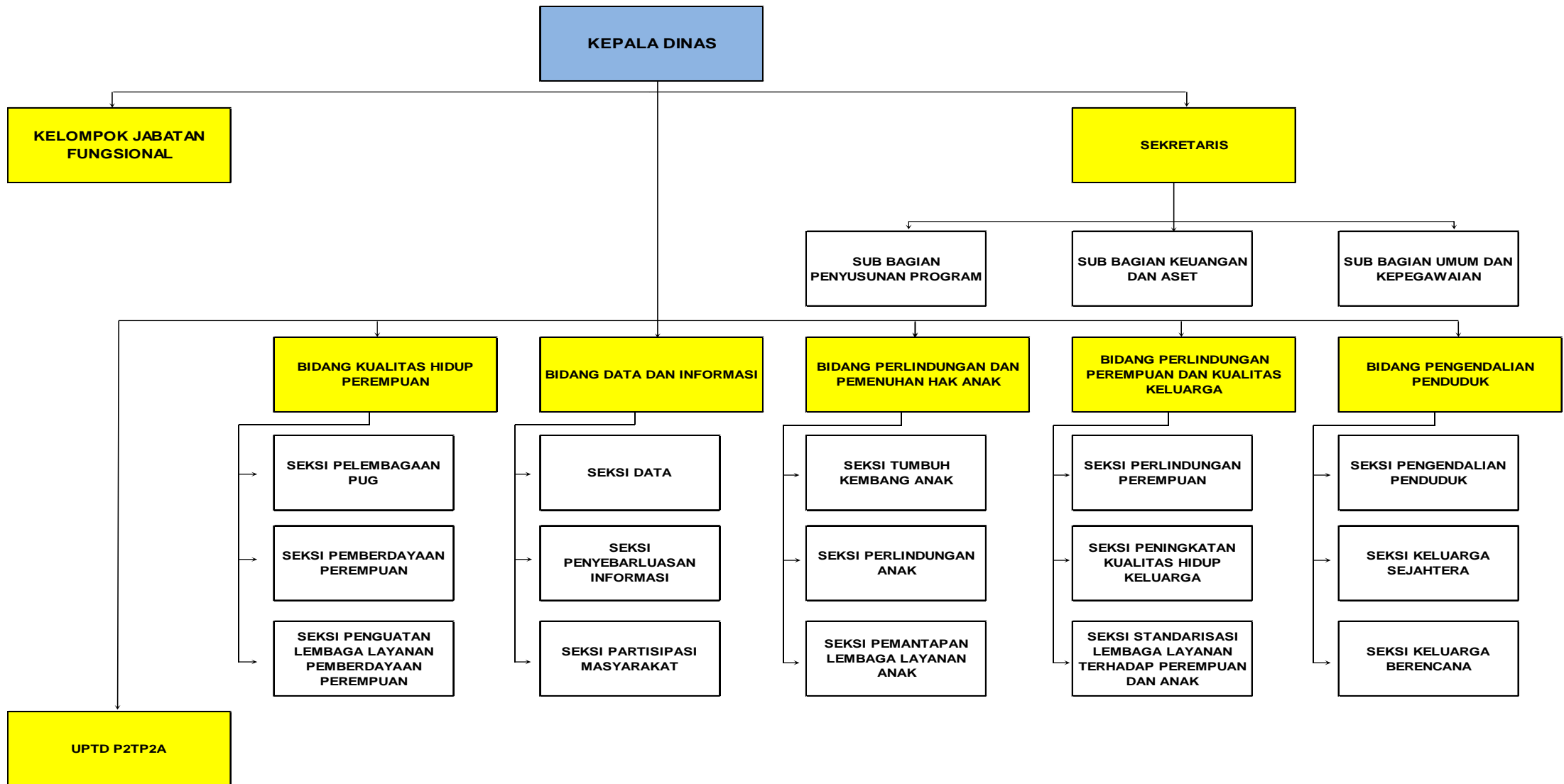
e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Perlindungan Perempuan
- Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga;
- Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi :
- Seksi Pengendalian Penduduk;
 - Seksi Kesehatan Reproduksi;
 - Seksi Keluarga Berencana.

Yang disajikan dalam susunan **Struktur Organisasi** sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

-) Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
-) Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan, anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
-) Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
-) Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan kadilam dan hak asasi serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
-) Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
-) Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
-) Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutama pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang PUG, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

-) Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
-) Tingkat pemahaman aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
-) Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
-) Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
-) Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
-) Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
-) Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

A. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
-) Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan minim peningkatan
-) Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat tidak terealisasi yang mana hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparatur negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

B. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tantangan

-) Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
-) Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
-) Disparitas Indek Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum dapat digambarkan
-) Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG

-) Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
-) Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utama Gender (PUG)
-) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
-) Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
-) Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
-) Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
-) Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
-) Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

Peluang

-) Menguatnya isu Gender
-) Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
-) Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
-) Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
-) Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja
-) Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
-) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
-) Kemajuan teknologi informasi
-) Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
-) Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.

-) Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
-) Kemudahan informasi tentang KB
-) Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
-) Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

Kekuatan

-) Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
-) Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
-) SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
-) Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
-) Terbentuknya jejaring kelembagaan
-) Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait

Kelemahan

-) Kurang optimalnya sarana dan prasarana
-) koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
-) Reward and Punishment belum berjalan optimal
-) Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
-) Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
-) Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
-) Anggaran masih terbatas
-) Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
-) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan

- J) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- J) Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

C. Isu-isu strategis DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah a Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
 - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :
 - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
 - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5(lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2016-2021 yang ditetapkan pada Perda Nomor tahun Disatu sisi, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2019 ini memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah maka DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan awal RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan awal RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Awal RKPD**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 2.3** sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)		1.395.608	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)		2.145.565	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	6.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	6.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	70.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	70.000	
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah unit	1 Unit	5.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah unit	0 Unit	0	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	90.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	90.000	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	650.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	658.100	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	64.608	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	150.000	
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	25.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	20.000	
8	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	60.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	60.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	80.000	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	80.000	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	10.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	10.000	
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah paket	1 Paket	80.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah paket	1 Paket	386.465	
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	20.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	70.000	
13	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	35.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	35.000	
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi	Jumlah bulan	12 Bulan	80.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi	Jumlah bulan	12 Bulan	300.000	
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah bulan	12 Bulan	110.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah bulan	12 Bulan	200.000	
16	Rujukan Berobat PNS	Luar Provinsi	Jumlah Aparatur	2 Orang	10.000	Rujukan Berobat PNS	Luar Provinsi	Jumlah Aparatur	2 Orang	10.000	
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)		47.797	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)		12.648.000	0
1	Pembangunan gedung kantor	Palangka Raya	Jumlah unit	0 Unit	0	Pembangunan gedung kantor	Palangka Raya	Jumlah unit	1 Unit	11.813.000	
2	Pengadaan Mobil Jabatan	Palangka Raya	Jumlah unit	0 Unit	0	Pengadaan Mobil Jabatan	Palangka Raya	Jumlah unit	1 Unit	350.000	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Jumlah unit	0 Unit	0	Pengadaan Mobil Jabatan	Palangka Raya	Jumlah unit	5 Unit	330.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengadaan Meubelair	Kota Palangka Raya	Jumlah paket	1 Paket	0	Pengadaan Meubelair	Kota Palangka Raya	Jumlah paket	1 Paket	85.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah unit	1 Unit	21.297	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah unit	1 Unit	25.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	Kota Palangka Raya	Jumlah unit	1 Unit	25.000	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	Kota Palangka Raya	Jumlah unit	1 Unit	30.000	
7	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Kota Palangka Raya	Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	1.500	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Kota Palangka Raya	Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	15.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)		30.250	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)		195.000	
1	Pengadaan Pakaian olahraga	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	75 Orang	0	Pengadaan Pakaian olahraga	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	76 Orang	45.000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	75 Orang	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	76 Orang	55.000	
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	75 Orang	30250	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	76 Orang	55000	
4	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	75 Orang	0	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	Kota Palangka Raya	Jumlah Aparatur	76 Orang	40.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Capaian peningkatan kapasitas pegawai (%)		162.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Capaian peningkatan kapasitas pegawai (%)		170.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aparatur	10 Orang	150.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aparatur	10 Orang	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Rapat koordinasi perencanaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rapat	12 Kali	12.000	Rapat koordinasi perencanaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rapat	12 Kali	120.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)		95.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)		427.308	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	15.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	15.000	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	15.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	15.000	
3	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	25.000	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	25.000	
4	Penyusunan renja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	25.000	Penyusunan renja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	25.000	
6	Penyusunan LKPJ LPPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	26.200	
7	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	236.100	
8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	Penyusunan renja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	293.108	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyusunan Dokumen ARG DP3A-PPKB	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	15.000	Penyusunan Dokumen ARG DP3A-PPKB	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	15.000	
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Capaian pengelolaan aset dan barang milik daerah (%)		22.650	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Capaian pengelolaan aset dan barang milik daerah (%)		22.650	
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	22.650	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	22.650	
VII	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)		3.037.000	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)		2.841.394	
1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000	
2	Sosialisasi RAD PUG Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Sosialisasi RAD PUG Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	
3	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	210.000	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	220.000	
4	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	
5	Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000	
6	Rapat Koordinasi Forum PKHP	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75000	Rapat Koordinasi Forum PKHP	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Sosialisasi Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Dokumen	-	Sosialisasi Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 Dokumen	0	
8	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90.000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90.000	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	
10	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	87.792	
11	Sosialisasi/Advokasi Pengembangan PHA di Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Sosialisasi/Advokasi Pengembangan PHA di Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	65.000	
12	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	202.642	
13	Rakornas Forum Anak Nasional	Luar Provinsi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000	Rakornas Forum Anak Nasional	Luar Provinsi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000	
14	Rakorda Forum Anak Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	75.000	Rakorda Forum Anak Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	75.000	
15	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	
16	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	285.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	225.960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	170.000	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000	
18	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	275.000	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	
19	Sosialisasi kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	75.000	Sosialisasi kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	75.000	
20	Sosialisasi Kebijakan PUG	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	75.000	Sosialisasi Kebijakan PUG	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 Orang	0	
21	Sosialisasi Kebijakan ARG	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	75.000	Sosialisasi Kebijakan ARG	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 Orang	0	
22	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	75.000	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	75.000	
23	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Luar Provinsi	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	350000	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Luar Provinsi	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	
24	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	
25	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perempuan dan Anak					Perempuan dan Anak					
26	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000	
27	Monev PUG di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/kota	14 Kab/Kota	84.000	Monev PUG di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/kota	14 Kab/Kota	50.000	
28	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/kota	14 Kab/Kota	84.000	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/kota	14 Kab/Kota	220.000	
29	Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/kota	14 Kab/Kota	84.000	Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/kota	14 Kab/Kota	220.000	
30	Konsultasi Kelembagaan Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	0 0	0	Konsultasi Kelembagaan Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	270.000	
31	Monitoring dan Evaluasi P2TP2A se-Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	0 0	0	Monitoring dan Evaluasi P2TP2A se-Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	220.000	
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)		250.000	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)		107.000	
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	34 Dokumen	50.000	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000	
2	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah OPD	0 OPD	-	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah OPD	0 OPD	-	
3	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD	Luar Provinsi	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD	Luar Provinsi	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Aplikasi ARG di SKPD					dan Aplikasi ARG di SKPD					
4	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	28 Orang	100.000	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 Orang	0	
5	Pelatihan ARG Bagi Focal Point SKPD Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	46 Orang	0	Pelatihan ARG Bagi Focal Point SKPD Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 Orang	0	
6	Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	20 Orang	100.000	Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 Orang	0	
7	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	- 0	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	57.000	
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)		1.454.014	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)		2.508.569	
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	5 Kegiatan	400.000	
2	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	50.000	
3	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	45.000	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan	0 Dokumen	0	
4	Penyusunan Buku Panduan Pencegahan KdRT	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	0 Eksamp lar	-	Penyusunan Buku Panduan Pencegahan KdRT	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	0 Eksamp lar	0	
5	Sosialisasi Anti Kekerasan	Provinsi Kalimantan	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	50.000	Sosialisasi Anti Kekerasan	Provinsi Kalimantan	Jumlah kegiatan	0 Kegiatan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tengah					Tengah				
6	Peningkatan Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	1 Unit	50.000	Peningkatan Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	0 Unit	0	
7	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	482.600	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	665.000	
8	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	35 Orang	100.000	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	35 Orang	200.000	
9	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah anggota satgas	80 Orang	26.414	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah anggota satgas	80 Orang	100.000	
10	Pelatihan Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kader	100 Orang	-	Pelatihan Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kader	0 Orang	-0	
11	Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	
12	Layanan Kesehatan Khusus Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	4 Orang	300.000	Layanan Kesehatan Khusus Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	300 Orang	300.000	
13	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	0	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	40.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Satgas PKdRT	Palangka Raya	Jumlah peserta	0 0	0	Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Satgas PKdRT	Palangka Raya	Jumlah peserta	14 0 Orang	532.000	
15	Sosialisasi dan Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Palangka Raya	Jumlah peserta	0 0	0	Sosialisasi dan Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Palangka Raya	Jumlah peserta	50 0 Orang	221.569	
X	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)		1.507.658	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)		1.250.000	
1	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan	1 Kali	137.285	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan	1 Kali	230.000	
2	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kaukus	1 Kaukus	60.000	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kaukus	1 Kaukus	60.000	
3	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	10 0 Orang	250.000	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	10 0 Orang	250.000	
4	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	50 Orang	60.000	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	50 Orang	125.470	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tangga					Tangga					
5	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60.000	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60.000	
6	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	60.000	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	1 Orang	42.000	
7	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen monev	1 Dokumen	31.916	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen monev	1 Dokumen	45.000	
8	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	50 Orang	100.000	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	50 Orang	100.000	
9	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.000	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.000	
10	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi dan Tingkat Nasional)					Provinsi dan Tingkat Nasional)					
11	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Desa PM2L	10 Desa	298.457	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	47.726	
12	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	2 kegiatan	250.000	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	2 kegiatan	200.000	
13	Capacity Building Bagi Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	4 Dokumen	60000	Capacity Building Bagi Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	4 Dokumen	37.000	
14	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Ibu Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 0	0	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Ibu Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	30 Orang	55.702	
XI	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak		Cakupan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak (%)		480.000	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak		Cakupan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak (%)		640.000	
1	Kegiatan Sunatan massal	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Anak	60 Orang	140.000	Kegiatan Sunatan massal	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Anak	70 Orang	140.000	
2	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	30 Orang	80.000	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	60 Orang	80.000	
3	Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	10 0 Orang	200.000	Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	10 0 Orang	200.000	
4	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pokja	1 Pokja	0	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pokja	40 Pokja	80.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	15 Orang	60.000	Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	40 Orang	60.000	
6	Pelatihan bagi Pendidik dan Pengasuh Anak Usia Dini	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	0 0	0	Pelatihan bagi Pendidik dan Pengasuh Anak Usia Dini	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	45 Orang	80.000	
XII	Program Penyusunan Profil Lembaga		Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)		680.000	Program Penyusunan Profil Lembaga		Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)		1.095.000	
1	Surveilen Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000	Surveilen Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000	
2	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	45.000	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	45.000	
3	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	170.000	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	170.000	
4	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000	
5	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	175.000	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	175.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	26 Orang	60.000	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	26 Orang	60.000	
7	Survailens Data Pemenuhan Hak Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000	Survailens Data Pemenuhan Hak Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000	
8	Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	90.000	Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	60.000	
9	Penguatan Forum LMM dalam Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Kebijakan Pembangunan Responsive Gender	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	0 0	0	Penguatan Forum LMM dalam Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Kebijakan Pembangunan Responsive Gender	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	
10	Penyusunan <i>Grand Design</i> DP3A-PPKB	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	0 0	0	Penyusunan <i>Grand Design</i> DP3A-PPKB	Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
11	Pengembangan PPID	Palangka Raya	Jumlah bulan	0 0	0	Pengembangan PPID	Palangka Raya	Jumlah bulan	4 Bulan	50.000.000	
XIII	Program Keluarga Berencana		Cakupan layanan kependudukan dan Pembinaan Keluarga (%)		987.300	Program Keluarga Berencana		Cakupan layanan kependudukan dan Pembinaan Keluarga (%)		1.849.196	
1	Pelayanan KIE	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	37.300	Pelayanan KIE	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	
2	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	10 0 Orang	75.000	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	10 0 Orang	75.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Promosi Kepedulian KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	1 Kegiatan	75.000	Promosi Kepedulian KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	1 Kegiatan	75.000	
4	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	1 Kegiatan	75.000	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	1 Kegiatan	45.000	
5	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	60 Orang	120.000	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	60 Orang	120.000	
6	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000	
7	Sosialisasi/Advokasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	Sosialisasi/Advokasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	
8	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000	
9	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	75.000	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	75.000	
10	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	75.000	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	75.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berencana dan Keluarga Sejahtera					Berencana dan Keluarga Sejahtera					
11	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	
12	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000	
13	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	30 Orang	75.000	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	30 Orang	75.000	
14	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	30 Orang	75.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	30 Orang	82.771	
15	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	0 0	0	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	64.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nasional)					Nasional)					
16	<i>Penyusunan kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1 dokumen	0	<i>Penyusunan kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1 dokumen	65.600	
17	<i>Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	1 Unit	0	<i>Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	1 Unit	40.000	
18	<i>Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50 Orang	0	<i>Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50 Orang	40.000	
19	<i>Promosi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50 Orang	0	<i>Promosi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50 Orang	40.000	
20	<i>Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40 Orang	0	<i>Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40 Orang	27.819	
21	<i>Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40 Orang	0	<i>Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40 Orang	30.000	
22	<i>Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	40 Lembaga	0	<i>Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	40 Lembaga	30.000	
23	<i>Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	30 Lembaga	0	<i>Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov.</i>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	30 Lembaga	91.602	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Unit	30 Unit	0	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Unit	30 Unit	90.600	
25	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40 Orang	0	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40 Orang	35.000	
26	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30 Orang	0	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30 Orang	64.200	
27	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30 Orang	0	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30 Orang	50.452	
28	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30 Orang	0	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30 Orang	25.300	
29	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	50 Unit	0	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	50 Unit	156.200	
XIV	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)		0	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)		236.615	
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	400 Orang	0	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta	400 Orang	236.615	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas		Cakupan penguatan Kelembagaan Kb di masyarakat(%)		0	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas		Cakupan penguatan Kelembagaan Kb di masyarakat(%)		49.704	
1	Peningkatan Kualitas SDM	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	100 Orang	0	Peningkatan Kualitas SDM	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	100 Orang	49.704	
	Jumlah				10.311.277	Jumlah				26.244.902	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

forum OPD sebagai sarana dua arah atau wadah organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, stakeholders, lembaga dinas/ instansi terkait dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyusun dan merencanakan program kerja pembangun untuk tahun 2019. Sebagai OPD yang menangani dan terkait terhadap isu-isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Rancangan rencana kerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah didiskusikan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan-usulan tersebut disajikan pada **tabel 2.4** :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM KELUARGA BERENCANA					
1.	Penyusunan kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1	
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	1	
3.	Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50	
4.	Promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50	
5.	Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40	
6.	Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40	
7.	Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	40	
8.	Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	30	
9.	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Unit	30	
10.	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40	
11.	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
12.	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga (orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30	
13.	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30	
14.	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	50	

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kemen PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2014–2019 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada massa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2014.

Visi Kemen PPPA

Visi Kemen PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kemen PPPA sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pertama, mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan tekad dan komitmen para penentu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peranserta masyarakat, melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak guna mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kemen PPPA akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat melalui peningkatan kualitas kemampuan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa diskriminasi dan atau kekerasan dengan semangat gotong royong.

Kedua, kemandirian suatu bangsa merupakan keniscayaan sehingga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sendiri. Pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender. Kemen PPPA berkontribusi mewujudkan kemandirian suatu bangsa melalui ketersediaan sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas bangsanya. Hal ini bisa diwujudkan oleh Pemerintah

bersama masyarakat dalam mengelola nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Kemen PPPA senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan bersama K/L dan Pemda dalam rangka mengakselerasikan pembangunan bangsa yang berkepribadian dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan semangat gotong royong.

Misi Kemen PPPA

Misi Kemen PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Misi Kemen PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja:

1. *Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum*

Pembangunan SDM harus dilaksanakan secara berkualitas untuk mencapai kemajuan yang berkeimbangan antara laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan secara inklusif mulai dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemen PPPA berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan kebijakan/program yang memperhatikan keleluasan akses pendidikan yang tinggi, menguasai ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yang berdampak positif untuk menciptakan masyarakat beradab dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak.

2. *Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera*

Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki secara inklusif harus diberi kemudahan untuk memperoleh akses dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang pada gilirannya dapat membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas, tercegahnya tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. *Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing*

Bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berkualitas akan berdampak pada produksi barang dan jasanya yang berkualitas. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi dalam tersedianya kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang tinggi, sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional, regional dan global.

4. *Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan*

Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemen PPPA dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L dan Pemda dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya, Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
3.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
4.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak
5.	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6.	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

Sasaran Strategis Kemen PPPA

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing:

- Tujuan 1 :** Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatkannya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- Tujuan 2 :** Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatkannya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.
- Tujuan 3 :** Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak
- Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
 2. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
6. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak,

yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional - Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / kota - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
			pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi	perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	- Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam - pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB 	tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 	-----	-----

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Visi

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APP-KB pada 5(lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Tujuan 1 | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan |
| Tujuan 2 | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan |
| Tujuan 3 | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak |
| Tujuan 4 | Meningkatkan kualitas data gender dan anak |
| Tujuan5 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tujuan 6 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera |

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| <i>Tujuan 1</i> | <i>Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan</i> |
| | Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “ <i>Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender</i> ” yang ditandai dengan: |

- a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
- b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
- c. Persentase perempuan di lembaga legislatif
- d. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempun

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO*” yang ditandai dengan:

- a. Rasio kekerasan terhadap perempuan

“*Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO*” yang ditandai dengan:

- a. Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

“*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak*”

yang ditandai dengan:

- a. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
- b. Rasio anak korban kekerasan

“*Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak*”

yang ditandai dengan:

- a. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak

Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:

“*Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak*”

yang ditandai dengan:

- a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

“*Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran*”

yang ditandai dengan:

- a. Hasil Penilaian SAKIP

Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :

“Menurunnya angka kelahiran”

yang ditandai dengan:

- a. Angka kelahiran total per WUS
- b. Rata-rata jumlah anak per Keluarga

“Meningkatnya akseptor KB”

yang ditandai dengan:

- a. Presentase pemakaian kontrasepsi

“Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)”

yang ditandai dengan:

- a. Presentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2019 disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Meliputi :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - Rujukan Berobat PNS
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Meliputi :**
- Pengadaan Meubelair
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir
 - Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Meliputi :**
- Pengadaan Pakaian olahraga
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - Pengadaan Pakaian Batik Tradisional
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- Pendidikan dan pelatihan formal
 - Rapat koordinasi perencanaan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Meliputi:**
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan RKA-SKPD
 - Penyusunan renja SKPD
 - Penyusunan Dokumen ARG DP3A-PPKB
- f. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah, Meliputi:**
- Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
- g. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Meliputi :**
- Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak
 - Sosialisasi RAD PUG Kab./Kota
 - Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota
 - Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi

- Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng
- Rapat Koordinasi Forum PKHP
- Sosialisasi Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng
- Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng
- Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga
- Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi
- Sosialisasi/Advokasi Pengembangan PHA di Kab./Kota se Kalimantan Tengah
- Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi
- Rakornas Forum Anak Nasional
- Rakorda Forum Anak Daerah
- Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu
- Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota
- Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota
- Sosialisasi kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Sosialisasi Kebijakan PUG
- Sosialisasi Kebijakan ARG
- Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
- Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan
- Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA
- Monev PUG di Daerah
- Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah
- Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah

h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Meliputi :

- Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
- Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD
- Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD
- TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)

- Pemantapan Jejaring Kelembagaan
- Pelatihan ARG Bagi Focal Point SKPD Provinsi
- Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG

i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Meliputi :

- Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng
- Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan
- Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalteng
- Penyusunan Buku Panduan Pencegahan KdRT
- Sosialisasi Anti Kekerasan
- Peningkatan Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan
- Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota
- Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)
- Pelatihan Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal
- Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan
- Deteksi Dini Kanker Cervix Bagi Perempuan
- Layanan Kesehatan Khusus Perempuan

j. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Meliputi :

- Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan
- Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah
- Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas
- Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah Tangga
- Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)
- Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
- Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

- Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
- Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)
- Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L
- Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan
- Capacity Building Bagi Perempuan

k. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Meliputi :

- Kegiatan Sunatan massal
- Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum
- Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas
- Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
- Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi

l. Program Penyusunan Profil Lembaga, Meliputi :

- Surveilans Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi
- Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak
- Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak
- Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak
- Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik
- Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak
- Surveilans Data Pemenuhan Hak Anak
- Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak

m. Program Keluarga Berencana, Meliputi :

- Pelayanan KIE
- Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)
- Promosi Kepedulian KB
- Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah
- Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah

- Sosialisasi/Advokasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota
- Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- *Penyusunan kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga*
- *Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.*
- *Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov*
- *Promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov.*
- *Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov*
- *Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov*
- *Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov*
- *Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov.*
- *Pemberian bantuan pengembangan UPPKS*
- *Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB*
- *Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum*
- *Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga*
- *Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga*
- *Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga*

n Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

- Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah

o. Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

- Peningkatan Kualitas SDM

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2019 memuat indikator kinerja *outcome/output* masing-masing Program/kegiatan, serta perkiraan maju tahun anggaran 2020 pada DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam **tabel 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)								
2:02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				26.244.902.700	APBD			13.695.437.700
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)		100	2.145.565.000	APBD		100	2.159.100.000
2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	6.000.000	APBD		12	6.000.000
2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	70.000.000	APBD		12	70.000.000
2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	90.000.000	APBD		12	90.000.000
2.02.2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	658.100.000	APBD		12	658.100.000
2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	150.000.000	APBD		12	150.000.000
2.02.2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	20.000.000	APBD		12	20.000.000
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	60.000.000	APBD		12	60.000.000
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	80.000.000	APBD		12	80.000.000
2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	10.000.000	APBD		12	10.000.000
2.02.2.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket	Palangka Raya	1	386.465.000	APBD		1	400.000.000
2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	70.000.000	APBD		12	70.000.000
2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan	Palangka Raya	12	35.000.000	APBD		12	35.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan	Luar Daerah	12	300.000.000	APBD		12	300.000.000
2.02.2.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah bulan	Dalam Daerah	12	200.000.000	APBD		12	200.000.000
2.02.2.02.01.01.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah Aparatur	Luar Daerah	1	10.000.000	APBD		1	10.000.000
2.02.2.02.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)		100	12.648.000.000	APBD		100	405.000.000
2.02.2.02.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit	Palangka Raya	1	11.813.000.000	APBD		0	0
2.02.2.02.01.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Unit	Palangka Raya	1	350.000.000	APBD		0	0
2.02.2.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit	Palangka Raya	5	330.000.000	APBD		1	250.000.000
2.02.2.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah paket	Palangka Raya	1	85.000.000	APBD		1	85.000.000
2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	Palangka Raya	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
2.02.2.02.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan tempat parkir	Jumlah unit	Palangka Raya	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
2.02.2.02.01.02.80	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi	Jumlah aplikasi	Palangka Raya	1	15.000.000	APBD		1	15.000.000
2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)		100	195.000.000	APBD		100	195.000.000
2.02.2.02.01.03.01	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah Aparatur	Palangka Raya	76	45.000.000	APBD		76	45.000.000
2.02.2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Aparatur	Palangka Raya	76	55.000.000	APBD		76	55.000.000
2.02.2.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Aparatur	Palangka Raya	76	55.000.000	APBD		76	55.000.000
2.02.2.02.01.03.09	Pengadaan pakaian batik tradisional	Jumlah Aparatur	Palangka Raya	76	40.000.000	APBD		76	40.000.000
2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas pegawai (%)		100	170.000.000	APBD		100	170.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur	Palangka Raya dan luar Kalteng	10	50.000.000	APBD		10	50.000.000
2.02.2.02.01.05.36	Rapat koordinasi perencanaan	Jumlah rapat	Palangka Raya	12	120.000.000	APBD		12	120.000.000
2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)		100	427.308.500	APBD		100	427.308.500
2.02.2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	28.000.000	APBD		1	28.000.000
2.02.2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	15.000.000	APBD		1	15.000.000
2.02.2.02.01.06.06	Penyusunan rka-SKPD	Jumlah dokumen	Palangka Raya	2	25.000.000	APBD		2	25.000.000
2.02.2.02.01.06.15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen	Palangka Raya	2	25.000.000	APBD		2	25.000.000
2.02.2.02.01.06.35	Penyusunan LKPJ LPPD	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	26.200.000	APBD		1	26.200.000
2.02.2.02.01.06.63	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	236.100.00	APBD		1	236.100.00
2.02.2.02.01.06.64	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	293.108.500	APBD		1	293.108.500
2.02.2.02.01.06.78	Penyusunan dokumen ARG DP3A-PPKB	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	15.000.000	APBD		1	15.000.000
2.02.2.02.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Capaian pengelolaan aset dan barang milik daerah (%)		100	22.650.000	APBD		100	22.650.000
2.02.2.02.01.08.01	Pengelolaan inventaris barang daerah	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	22.650.000	APBD		1	22.650.000
2.02.2.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)		100	2.841.394.600	APBD		100	2.841.394.600
2.02.2.02.01.15.05	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tengah						
2.02.2.02.01.15.09	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	2	220.000.000	APBD		2	220.000.000
2.02.2.02.01.15.11	Rakor Pokja PUG Kab./Kota seKalteng	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
2.02.2.02.01.15.15	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	90.000.000	APBD		1	90.000.000
2.02.2.02.01.15.20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA TingkatProvinsi	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	40	87.792.000	APBD		40	87.792.000
2.02.2.02.01.15.21	Sosialisasi/Advokasi pengembangan PHA diKab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	65.000.000	APBD		1	65.000.000
2.02.2.02.01.15.24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Jumlah peserta	Palangka Raya	50	202.642.500	APBD		50	202.642.500
2.02.2.02.01.15.25	Rakornas Forum Anak Nasional	Jumlah Dokumen	luar Kalteng	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
2.02.2.02.01.15.26	Rakorda Forum Anak Daerah	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	50	75.000.000	APBD		50	75.000.000
2.02.2.02.01.15.27	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000
2.02.2.02.01.15.29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	225.960.100	APBD		1	225.960.100
2.02.2.02.01.15.30	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
2.02.2.02.01.15.32	Sosialisasi kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah peserta	Palangka Raya	40	75.000.000	APBD		40	75.000.000
2.02.2.02.01.15.35	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta	Palangka Raya	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.15.38	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	35.000.000	APBD		1	35.000.000
2.02.2.02.01.15.39	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	Jumlah peserta	Palangka Raya	30	35.000.000	APBD		30	35.000.000
2.02.2.02.01.15.40	Monev PUG di Daerah	Jumlah Kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	14	50.000.000	APBD		14	50.000.000
2.02.2.02.01.15.41	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Di daerah	Jumlah Kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	14	220.000.000	APBD		14	220.000.000
2.02.2.02.01.15.42	Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah	Jumlah Kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	14	220.000.000	APBD		14	220.000.000
2.02.2.02.01.15.xx	Konsultasi Kelembagaan Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	270.000.000	APBD		1	270.000.000
2.02.2.02.01.15.xx	Monitoring dan Evaluasi P2TP2A se- Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	220.000.000	APBD		1	220.000.000
2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)		100	107.000.000	APBD		100	107.000.000
2.02.2.02.01.16.33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
2.02.2.02.01.16.42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	57.000.000	APBD		1	57.000.000
2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)		100	2.528.569.000	APBD		100	2.508.569.000
2.02.2.02.01.17.26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000
2.02.2.02.01.17.27	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Jumlah dokumen	Palangka Raya	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
2.02.2.02.01.17.31	Promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kegiatan	Palangka Raya	4	40.000.000	APBD		4	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.17.33	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	685.000.000	APBD		1	665.000.000
2.02.2.02.01.17.35	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	Jumlah peserta	Palangka Raya	80	200.000.000	APBD		80	200.000.000
2.02.2.02.01.17.36	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	Jumlah anggota satgas	Palangka Raya	12	100.000.000	APBD		12	100.000.000
2.02.2.02.01.17.40	Layanan Kesehatan Khusus Perempuan	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	100	300.000.000	APBD		100	300.000.000
2.02.2.02.01.17.xx	Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Satgas PKdRT	Jumlah peserta	Palangka Raya	140	532.000.000	APBD		140	532.000.000
2.02.2.02.01.17.xx	Sosialisasi dan Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Jumlah peserta	Palangka Raya	50	221.569.000	APBD		50	221.569.000
2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)		100	1.292.898.600	APBD		100	1.292.898.600
2.02.2.02.01.18.07	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Jumlah kegiatan	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	230.000.000	APBD		1	230.000.000
2.02.2.02.01.18.08	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kaukus	Provinsi Kalimantan Tengah	1	60.000.000	APBD		1	60.000.000
2.02.2.02.01.18.11	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	80	250.000.000	APBD		80	250.000.000
2.02.2.02.01.18.12	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah Tangga	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	30	125.470.000	APBD		30	125.470.000
2.02.2.02.01.18.13	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	60.000.000	APBD		1	60.000.000
2.02.2.02.01.18.14	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	100	42.000.000	APBD		100	42.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.18.15	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah dokumen movev	Provinsi Kalimantan Tengah	1	45.000.000	APBD		1	45.000.000
2.02.2.02.01.18.17	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	140.000.000	APBD		1	140.000.000
2.02.2.02.01.18.19	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	30	47.726.000	APBD		30	47.726.000
2.02.2.02.01.18.25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Jumlah dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	2	200.000.000	APBD		2	200.000.000
2.02.2.02.01.18.26	Capacity Building Bagi perempuan	Jumlah dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	37.000.000	APBD		1	37.000.000
2.02.2.02.01.18.xx	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Ibu Rumah Tangga	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	30	55.702.600			30	55.702.600
2.02.2.02.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak (%)		100	640.000.000	APBD		100	640.000.000
2.02.2.02.01.20.07	Kegiatan Sunatan massal	Jumlah Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	70	140.000.000	APBD		70	140.000.000
2.02.2.02.01.18.17	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	60	80.000.000	APBD		60	80.000.000
2.02.2.02.01.18.18	Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	100	200.000.000	APBD		100	200.000.000
2.02.2.02.01.18.20	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	40	80.000.000	APBD		40	80.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.18.21	Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	40	60.000.000	APBD		40	60.000.000
2.02.2.02.01.xx.xx	Pelatihan bagi Pendidik dan Pengasuh Anak Usia Dini	Jumlah peserta	Palangka Raya	45	80.000.000	APBD		45	80.000.000
2.02.2.02.01.21	Program Penyusunan Profil Lembaga	Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)		100	1.095.000.000	APBD		100	795.000.000
2.02.2.02.01.21.07	Surveilan Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	45.000.000	APBD		1	45.000.000
2.02.2.02.01.21.09	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah aplikasi	Palangka Raya	1	45.000.000	APBD		1	45.000.000
2.02.2.02.01.21.10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	175.000.000	APBD		1	175.000.000
2.02.2.02.01.21.11	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
2.02.2.02.01.21.12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	2	175.000.000	APBD		2	175.000.000
2.02.2.02.01.21.13	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah peserta	Palangka Raya	40	60.000.000	APBD		40	60.000.000
2.02.2.02.01.21.17	Survailens Data Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	45.000.000	APBD		1	45.000.000
2.02.2.02.01.21.18	Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	60.000.000	APBD		1	60.000.000
2.02.2.02.01.21.xx	Penguatan Forum LMM dalam Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Kebijakan Pembangunan <i>Responsive Gender</i>	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	90.000.000	APBD		1	90.000.000
2.02.2.02.01.21.xx	Penyusunan <i>Grand Design</i> DP3A-PPKB	Jumlah Dokumen	Palangka Raya	1	300.000.000	APBD		0	0
2.02.2.02.01.21.xx	Pengembangan PPID	Jumlah bulan	Palangka Raya	4	50.000.000	APBD		4	50.000.000
2:08	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				2.131.517.000	APBD			2.131.517.000
2.08.2.02.01 - 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan layanan kependudukan dan Pembinaan Keluarga (%)		100	1.849.196.000	APBD		100	1.849.196.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.02.01.15.02	Pelayanan KIE	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000
2.08.2.02.01.15.22	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	100	75.000.000	APBD		100	75.000.000
2.08.2.02.01.15.24	Promosi Kepedulian KB	Jumlah promosi	Provinsi Kalimantan Tengah	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000
2.08.2.02.01.15.25	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	Provinsi Kalimantan Tengah	1	45.000.000	APBD		1	45.000.000
2.08.2.02.01.15.26	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah Peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	60	120.000.000	APBD		60	120.000.000
2.08.2.02.01.15.27	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	45.000.000	APBD		1	45.000.000
2.08.2.02.01.15.28	Sosialisasi/Advokasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000
2.08.2.02.01.15.29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah, luarkalteng	1	35.000.000	APBD		1	35.000.000
2.08.2.02.01.15.31	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	40	75.000.000	APBD		40	75.000.000
2.08.2.02.01.15.33	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	40	75.000.000	APBD		40	75.000.000
2.08.2.02.01.15.34	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.02.01.15.35	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000
2.08.2.02.01.15.36	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	40	75.000.000	APBD		40	75.000.000
2.08.2.02.01.15.37	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	40	82.771.000	APBD		40	82.771.000
2.08.2.02.01.xxxx	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1	64.200.000	APBD		1	64.200.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	30	30.452.000	APBD		30	30.452.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov	Jumlah peserta/unit	Provinsi Kalimantan Tengah	100	65.600.000	APBD		100	65.600.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	50	40.000.000	APBD		50	40.000.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov.	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	50	40.000.000	APBD		50	40.000.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov. (orang)	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	40	27.819.000	APBD		40	27.819.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.(orang)	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	40	30.000.000	APBD		40	30.000.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov.	Jumlah Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	40	30.000.000	APBD		40	30.000.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov	Jumlah Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	30	91.602.000	APBD		30	91.602.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tengah						
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS	Jumlah Unit	Provinsi Kalimantan Tengah	30	90.600.000	APBD		30	90.600.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	40	35.000.000	APBD		40	35.000.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	30	64.200.000	APBD		30	64.200.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	30	55.452.000	APBD		30	55.452.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga	Jumlah orang	Provinsi Kalimantan Tengah	30	25.300.000	APBD		30	25.300.000
2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga	Jumlah unit	Provinsi Kalimantan Tengah	50	156.200.000	APBD		50	156.200.000
2.08 . 2.02.1 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)		100	232.616.500	APBD		100	232.616.500
2.08 . 2.02.1 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta	Provinsi Kalimantan Tengah	400	232.616.500	APBD		400	232.616.500
2.08 . 2.02.1 . 25	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Cakupan penguatan Kelembagaan Kb di masyarakat(%)			49.704.500	APBD			49.704.500
2.08 . 2.02.1 . 25 . 06	Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah Peserta	Kota Palangka Raya	100	49.704.500	APBD		100	49.704.500
Total					26.244.902.700				13.695.437.700

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*Trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi Keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak. Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari capaian layanan DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder, mengingat jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari

keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Palangka Raya, 02 Juli 2018

KEPALA DINAS P3APKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 0011